

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Probolinggo

Sinta Angraini¹, Zuraidah²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Malang, Indonesia

e-mail: sintaangraini@undiksha.ac.id, zuraidah@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo. Kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meskipun Pemerintah Kota Probolinggo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan, seperti keterlambatan pelaporan, gangguan jaringan sistem, dan keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi keuangan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 122 pegawai organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis data dilakukan menggunakan metode pemodelan persamaan struktural berbasis varians dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Good Governance dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, kompetensi aparatur, dan implementasi sistem informasi yang optimal.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

This study aims to analyze the influence of the Regional Government Information System, Internal Control System, Good Governance, and human resource quality on the quality of local government financial statements in the Probolinggo City Government. The quality of financial statements is an important indicator in creating transparent and accountable governance. Although the Probolinggo City Government has obtained an Unqualified Opinion, several obstacles are still found in the preparation of financial statements, such as reporting delays, system network disruptions, and limited employee capability in operating digital financial applications. This study used a quantitative approach with an explanatory research type. Data were collected through questionnaires distributed to 122 regional apparatus employees involved in regional financial management. Data analysis was conducted using variance-based structural equation modeling with the assistance of SmartPLS 3 software. The results showed that the Regional Government Information System had

a negative and significant effect on the quality of local government financial statements. Meanwhile, the Internal Control System, Good Governance, and human resource quality had a positive and significant effect on the quality of local government financial statements. Good Governance and human resource quality were the most dominant factors in improving the quality of financial statements. This study concludes that the quality of local government financial statements is influenced by governance practices, the effectiveness of internal control, employee competence, and the optimal implementation of information systems.

Keywords : *Regional Government Information System, Internal Control System, Good Governance, Human Resource Quality, Financial Report Quality*

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari beberapa laporan keuangan organisasi perangkat daerah dalam pemerintah daerah tersebut (Salsabila, 2024). Menurut Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 paragraf 24, laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh aktivitas yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode. Keberadaan laporan keuangan sangat penting untuk menilai bagaimana sumber daya ekonomi dikelola, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh bagaimana proses mulai dari identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, hingga pengikhtisaran setiap transaksi dilakukan (Yulianda et al., 2022). Dalam konteks global, perkembangan teknologi mendorong tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi Good Governance, dimana kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintah dan kepercayaan publik (Ramadhani & Yaya, 2024). World Bank (2023) menegaskan pentingnya sistem manajemen publik yang berkualitas, sementara Nations (2022) menyoroti peran sistem informasi digital dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, tuntutan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas implementasi. Berdasarkan BPK (2023), ditemukan 9.261 temuan senilai Rp18,19 triliun yang mayoritas berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal, keterlambatan pelaporan, dan

ketidakpatuhan terhadap regulasi. Meskipun opini audit LKPD menjadi indikator utama kualitas pelaporan (BPK RI, 2024), temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya persoalan formalitas, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam pengelolaan keuangan publik. Fenomena ini juga terjadi di Kota Probolinggo, dimana meskipun telah memperoleh opini WTP secara berturut-turut (BPK RI, 2024), masih ditemukan kendala administratif dan teknis, seperti keterlambatan penyusunan dokumen SPP, SPM, dan SP2D akibat keterbatasan jaringan dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem SIPD (Muttaqin et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara capaian audit dan kualitas implementasi di tingkat operasional.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal organisasi. Lemahnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan kompetensi SDM, serta belum optimalnya penerapan Good Governance menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan (Ardiansyah et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya gap antara sistem yang diterapkan dan hasil yang diharapkan, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif terhadap determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengintegrasikan dua perspektif utama, yaitu Stewardship Theory dan Agency Theory. Stewardship Theory yang diperkenalkan oleh Davis et al. (1997) menekankan bahwa aparatur pemerintah sebagai steward memiliki

motivasi intrinsik untuk bertindak sesuai kepentingan organisasi dan publik melalui komitmen, integritas, dan tanggung jawab moral (Sanjaya, 2017). Dalam konteks ini, penerapan Good Governance, optimalisasi sistem informasi seperti SIPD, serta peningkatan kualitas SDM mencerminkan perilaku aparatur yang berorientasi pada kepentingan publik dan akuntabilitas.

Agency Theory oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian seperti Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan transparansi pelaporan untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Mediaty et al. 2025). Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Integrasi kedua teori ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif, dimana kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme kontrol, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan profesionalisme aparatur.

Secara konseptual, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan proses perencanaan hingga pelaporan keuangan secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan (Fitriani & Solikhin, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan perangkat lunak dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan mampu mempermudah pengguna dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan secara lebih efektif dan efisien (Sentosa & Zuraidah, 2020). Keberhasilan SIPD juga dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna (Delone & McLean, 2003). Selain itu, Sistem Pengendalian Internal (SPI) berfungsi sebagai mekanisme

pengawasan yang memastikan keandalan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi (PP No. 60 Tahun, 2008) (Rahmawati et al. 2022).

Penerapan Good Governance menjadi faktor penting lainnya karena menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik (Ardiansyah et al., 2025). Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM) menentukan keberhasilan implementasi sistem dan kebijakan, karena kompetensi aparatur berpengaruh langsung terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan (Naida, 2024). Dengan demikian, keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan karakteristik kualitatif sesuai SAP, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Yenni et al., 2024).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih terbatas pada pengujian parsial antar variabel dan belum mengintegrasikan SIPD sebagai sistem digital yang bersifat mandatory dalam satu model analisis yang komprehensif. Selain itu, kajian pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kota Probolinggo, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Good Governance, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pemerintah Kota Probolinggo.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini berikut disajikan tabel research gap yang membandingkan penelitian ini dengan lima penelitian terbaru (2023-2025):

Tabel 1 Research Gap: Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu (2023-2025)

Penelitian	Variabel yang Diteliti	Keterbatasan / Gap	Kontribusi Penelitian Ini
------------	------------------------	--------------------	---------------------------

(Naida, 2024)	SIPD, SPIP, Kompetensi SDM	Tidak mengintegrasikan Good Governance; konteks umum (bukan spesifik kota)	Mengintegrasikan SIPD + SPI + GG + SDM dalam satu model di Kota Probolinggo
(Ardiansyah et al., 2025)	Good Governance, Kualitas Laporan Keuangan	Tidak mempertimbangkan peran SIPD sebagai sistem mandatory; lingkup variabel terbatas	Memasukkan SIPD sebagai variabel teknologi wajib bersama GG, SPI, dan SDM
(Ramadhani & Yaya, 2024)	Determinan kualitas laporan keuangan dengan SPI sebagai moderasi	SPI sebagai variabel moderasi, bukan eksogen langsung; SIPD tidak diuji	SPI sebagai variabel independen langsung; menguji efek langsung SIPD
(Napitupulu et al., 2024)	Efektivitas implementasi SIPD (kajian literatur)	Hanya kajian literatur, tidak menguji hubungan kausal secara empiris	Pengujian empiris dengan SEM-PLS pada konteks Kota Probolinggo
(Mediaty et al., 2025)	Kompetensi SDM	Variabel terbatas pada	Model komprehensif

2025)	terhadap kualitas laporan keuangan	SDM; tidak menguji SIPD, SPI, dan GG secara bersama	yang menggabungkan SDM dengan tiga variabel determinan lainnya
-------	------------------------------------	---	--

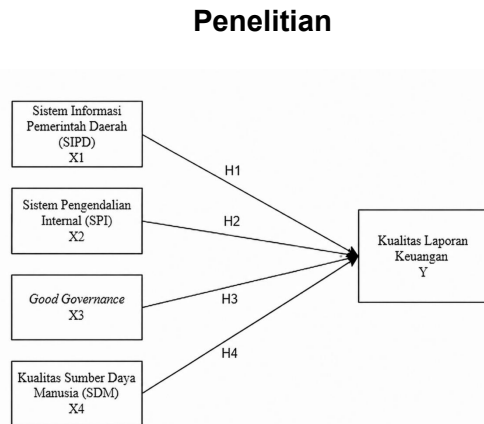
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pengembangan Stewardship Theory dan Agency Theory dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui integrasi empat variabel utama, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Good Governance, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam satu model empiris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menguji variabel secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sektor publik dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknologi, tata kelola, pengendalian, dan kompetensi aparatur secara simultan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas laporan keuangan. Temuan mengenai pengaruh negatif SIPD memberikan masukan penting terkait perlunya perbaikan infrastruktur teknologi, peningkatan integrasi sistem, serta penguatan kompetensi pengguna. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan penerapan prinsip Good Governance, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual disajikan pada gambar berikut. Model konseptual menggambarkan pengaruh langsung empat variabel independent, yaitu SIPD (X1), SPI (X2), Good Governance (X3), dan Kualitas SDM (X4) terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Gambar 1 Kerangka Konseptual



(Gambar kerangka konseptual:

SIPD (X1) → KLK (Y)

SPI (X2) → KLK (Y)

Good Governance (X3) → KLK (Y)

Kualitas SDM (X4) → KLK (Y)

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Good Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal serta memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sugiono, 2020; Hardani et al., 2020). Penggunaan metode kuantitatif memungkinkan pengujian hipotesis secara sistematis menggunakan data numerik dan skala Likert melalui teknik analisis *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM-PLS) yang dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.

Data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur berbasis Google Form. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat persetujuan responden. Alat analisis utama yang digunakan adalah SEM-PLS untuk menilai hubungan antarvariabel laten secara menyeluruh. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dengan fokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). BPPKAD dipilih sebagai objek penelitian karena menggunakan unit kerja utama yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sekaligus menjadi pengguna utama SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian, responden dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari ASN BPPKAD yang secara langsung terlibat dalam penggunaan SIPD dan penyusunan LKPD. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner secara daring kepada responden sebagai sumber data

primer. Populasi penelitian adalah seluruh ASN pada BPPKAD Pemerintah Kota Probolinggo. Penentuan sampel menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Hardani et al., 2020; Sugiono, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN pada BPPKAD Pemerintah Kota Probolinggo yang secara langsung terlibat dalam proses penyusunan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, dengan jumlah populasi sekitar sebanyak 115 sampai dengan maksimum 230 sampel berdasarkan data kepegawaian BPPKAD tahun 2025. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel yang ditetapkan adalah 122 responden, yang telah memenuhi kriteria kelayakan sampel dalam model PLS-SEM (Hair et al., 2020).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel penelitian diukur menggunakan skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 5 (Sangat Setuju) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah /SIPD (X1) Sistem terpadu yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan secara elektronik (Fitriani & Solikhin, 2024; Delone & McLean, 2016).
 - o Indikator: Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, intensitas pengguna, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.
2. Sistem Pengendalian Internal / SPI (X2) Proses integral yang diterapkan oleh pemimpin dan aparatur pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan, dan kepatuhan hukum (Hanif et al., 2023; Ridzal et al., 2022).
 - o Indikator: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

3. Good Governance (X3) Tata kelola yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan hukum guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan (Karso, 2022; Ardiansyah et al., 2025).
 - o Indikator: Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan hukum.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia / SDM (X4) Kemampuan, kompetensi, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara profesional (Mediaty et al., 2025; Yenni et al., 2024).
 - o Indikator: Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.
5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah / Y Sejauh mana laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan, terpercaya, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Yenni et al., 2024; Rahmawati et al., 2022).
 - o Indikator: Relevansi, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Jumlah Item	Sumber
SIPD (X1)	Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, intensitas pengguna, ,	6 item	(Delone & McLean, 2003, 2016; Fitriani & Solikhin, 2024)

	kepuasan pengguna, manfaat bersih		
SPI (X2)	Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan	5 item	(PP No. 60/2008; Hanif et al., 2023) (2023)
Good Governance (X3)	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan hukum	5 item	(Ardiansyah et al., 2025; Karso, 2022)
Kualitas SDM (X4)	Pengetahuan, keterampilan, kemampuan	3 item	(Mediaty et al., 2025; Yenni et al., 2024)
Kualitas	Relevansi	4	(Rahma

Laporan Keuangan (Y)	, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dapat dipahami	item	wati et al., 2022; Yenni et al., 2024)
----------------------	---	------	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengumpulkan data dari 122 responden yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Karakteristik responden didominasi oleh perempuan sebanyak 68 orang (55,7%) dibandingkan laki-laki sebanyak 54 orang (44,3%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 41–50 tahun, yaitu sebanyak 63 orang (51,6%). Sementara itu, berdasarkan masa kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja 11–20 tahun (53,3%), yang mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup dalam administrasi keuangan daerah.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data penelitian melalui nilai mean, median, modus, dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik responden serta kondisi data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pegawai Pemerintah Kota Probolinggo.

Table 1 Descriptive Statistics Test Result

	Mean	Median	Minimum	Maximum	Standart Deviation
SIPD1	4.377	4.000	3.000	5.000	0.501
SIPD2	4.230	4.000	2.000	5.000	0.598
SIPD3	4.303	4.000	2.000	5.000	0.542
SIPD4	4.254	4.000	3.000	5.000	0.489
SIPD5	4.156	4.000	3.000	5.000	0.512
SIPD6	4.344	4.000	3.000	5.000	0.540
SPI1	4.303	4.000	3.000	5.000	0.494
SPI2	4.270	4.000	3.000	5.000	0.496
SPI3	4.254	4.000	3.000	5.000	0.472

SPI4	4.279	4.000	3.000	5.000	0.484
SPI5	4.328	4.000	2.000	5.000	0.519
GG1	4.303	4.000	3.000	5.000	0.510
GG2	4.303	4.000	3.000	5.000	0.477
GG3	4.230	4.000	3.000	5.000	0.458
GG4	4.246	4.000	3.000	5.000	0.484
GG5	4.295	4.000	4.000	5.000	0.456
KSDM1	4.344	4.000	4.000	5.000	0.475
KSDM2	4.279	4.000	3.000	5.000	0.484
KSDM3	4.303	4.000	4.000	5.000	0.460
KLK1	4.369	4.000	4.000	5.000	0.482
KLK2	4.344	4.000	3.000	5.000	0.508
KLK3	4.328	4.000	3.000	5.000	0.487
KLK4	4.311	4.000	4.000	5.000	0.463

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 1, variabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki nilai rata-rata antara 4,156–4,377 dengan standar deviasi 0,489–0,598. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang baik terhadap implementasi SIPD, serta tingkat variasi jawaban

yang relatif rendah. Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) menunjukkan nilai rata-rata 4,254–4,328 dengan standar deviasi 0,472–0,519. Hal ini mengindikasikan bahwa SPI telah berjalan dengan baik dan persepsi responden cenderung konsisten. Sementara itu, variabel Good Governance memiliki nilai rata-rata 4,230–4,303 dengan standar deviasi 0,458–0,510, yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan dinilai positif dan merata. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) memiliki nilai rata-rata 4,279–4,344 dengan standar deviasi 0,460–0,484, yang mencerminkan bahwa kompetensi dan kemampuan pegawai dinilai baik. Selanjutnya, variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan rata-rata 4,322–4,369 dengan standar deviasi 0,463–0,508, yang mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan dinilai tinggi dan konsisten oleh responden. Secara keseluruhan, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 4,00 dengan standar deviasi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap variabel yang diteliti serta

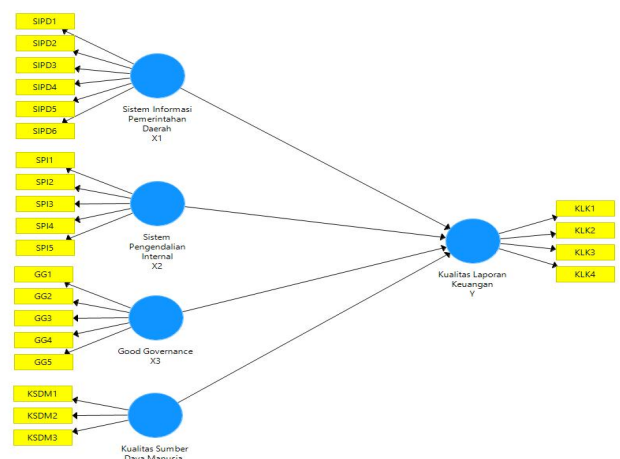
memiliki tingkat keseragaman jawaban yang tinggi.

Skema Model Patial Least Square (PLS)

Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel laten dan indikatornya secara simultan. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan PLS dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3

Gambar 2 Model Patial Least Square

Source: Research Data (2026)



Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Convergent validity diukur melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE). Indikator dinyatakan valid jika outer loading > 0,7 dan AVE > 0,5, meskipun pada tahap awal penelitian nilai

0,50–0,60 masih dapat diterima (Hussein, 2015).

Tabel 2 Hasil Uji Outer Loading

	GG	KLK	KSDM	SIPD	SPI
GG1	0.865				
GG2	0.936				
GG3	0.874				
GG4	0.881				
GG5	0.923				
KLK1		0.926			
KLK2		0.868			
KLK3		0.899			
KLK4		0.906			
KSDM1			0.914		
KSDM2			0.957		
KSDM3			0.959		
SIPD1				0.802	
SIPD2				0.817	
SIPD3				0.794	
SIPD4				0.642	
SIPD5				0.744	
SIPD6				0.850	
SPI1					0.862
SPI2					0.915
SPI3					0.916
SPI4					0.886
SPI5					0.796

Berdasarkan tabel 2, indikator pada variabel SIPD, SPI, Good Governance, Kualitas SDM, dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai outer loading di atas 0,50 sehingga dinyatakan valid. Meskipun indikator SIPD4 memiliki nilai 0,642 (di bawah 0,70), indikator tersebut tetap dapat diterima karena masih memenuhi batas minimum serta didukung oleh nilai AVE yang memadai, sehingga

seluruh indikator tetap dipertahankan dalam model.

Tabel 3 Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Good Governance	0.803
Kualitas Laporan Keuangan	0.810
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.890
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	0.605
Sistem Pengendalian Internal	0.767

Berdasarkan tabel 3, *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal menunjukkan nilai AVE diatas 0,5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa para indikator yang mengukur variable tersebut dinyatakan valid.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan dievaluasi melalui nilai cross loading, di mana indikator dinyatakan valid jika memiliki loading tertinggi pada konstraknya dibandingkan konstruk lain (Sihombing & Arsani, 2024).

Tabel 4 Hasil Uji Cross Loading

	GG	KLK	KSDM	SIPD	SPI
GG1	0.865	0.765	0.670	0.677	0.771
GG2	0.936	0.799	0.691	0.684	0.745
GG3	0.874	0.708	0.591	0.676	0.725
GG4	0.881	0.704	0.636	0.669	0.70
GG5	0.923	0.759	0.681	0.724	0.709
KLK1	0.755	0.926	0.791	0.550	0.659
KLK2	0.655	0.826	0.661	0.550	0.659

	95	68	5	25	87
	0.7	0.8	0.71	0.4	0.6
KLK3	50	99	9	78	19
	0.8	0.9	0.75	0.5	0.6
KLK4	02	06	1	32	74
KSD	0.6	0.7	0.91	0.5	0.6
M1	40	46	4	43	09
KSD	0.6	0.7	0.95	0.5	0.6
M2	99	61	7	58	10
KSD	0.7	0.7	0.95	0.5	0.6
M3	27	97	9	59	14
SIPD	0.5	0.4	0.46	0.8	0.6
1	41	22	9	02	02
SIPD	0.5	0.3	0.35	0.8	0.5
2	41	48	9	17	62
SIPD	0.5	0.4	0.46	0.7	0.5
3	96	15	0	94	83
SIPD	0.5	0.4	0.43	0.6	0.4
4	61	35	0	42	59
SIPD	0.5	0.3	0.41	0.7	0.5
5	22	39	1	44	85
SIPD	0.7	0.6	0.54	0.8	0.7
6	33	26	7	50	26
SPI1	0.6	0.5	0.51	0.7	0.8
	13	78	8	15	62
SPI2	0.7	0.6	0.54	0.6	0.9
	22	05	8	74	15
SPI3	0.7	0.6	0.58	0.7	0.9
	76	78	8	31	16
SPI4	0.7	0.6	0.61	0.7	0.8
	55	89	4	14	86
SPI5	0.6	0.6	0.55	0.5	0.7
	57	40	5	13	96

Berdasarkan tabel 4, Hasil uji cross loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstraknya, sehingga mampu membedakan variabel dengan baik dan memenuhi validitas diskriminan.

Uji Fornell-Larcker Criterion					
	KL				
	GG	K	KSD	SIPD	SPI
	X3	Y	M_X4	_X1	_X2
GG_	0.8				
X3	96				
KLK_	0.8	0.9			
Y	35	00			
KSD	0.7	0.8			
M_X4	31	14	0.943		
SIPD	0.7	0.5		0.77	
_X1	66	79	0.586	8	

SPI_	0.8	0.7		0.76	0.87
X2	09	32	0.647	6	6

Selain menggunakan Cross Loading, validitas diskriminan juga dievaluasi menggunakan Fornell-Larcker Criterion. Konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila akar kuadrat nilai AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya (Hair et al., 2020).

Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk mengukur keandalan konstruk melalui nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilainya di atas 0,70, meskipun rentang 0,60–0,70 masih dapat diterima pada penelitian eksploratif (Sihombing & Arsani, 2024).

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_c)
Good Governance	0.939	0.953
Kualitas Laporan Keuangan	0.922	0.945
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.938	0.960
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	0.869	0.901
Sistem Pengendalian Internal	0.923	0.943

Good Governance, kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan daerah, dan sistem pengendalian internal, memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dan indikator yang digunakan telah memenuhi

kriteria reliabilitas dan dinyatakan konsisten dalam mengukur variabel penelitian.

Pengujian Struktural Model (*Inner Model*)

Uji *R-Square* (R^2)

R-Square merupakan koefisien determinasi yang menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, dengan kriteria 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah) (Sihombing & Arsani, 2024). Nilai ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan model yang dianalisis menggunakan SmartPLS 3.

Tabel 6 Hasil Uji *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Laporan Keuangan_Y	0.811	0.804

Uji *Q-Square*

Q-Square mengukur kemampuan prediktif model melalui teknik *blindfolding*. Nilai *Q-Square* > 0 menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance* dan layak digunakan (Sihombing & Arsani, 2024).

Tabel 7 Hasil Uji *Q-Square*

	Q^2 (=1-SSE/SSO)
<i>Good Governance_X3</i>	0.000
Kualitas Laporan Keuangan_Y	0.647
Kualitas Sumber Daya Manusia_X4	0.000
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah_X1	0.000
Sistem Pengendalian Internal_X2	0.000

Q predict variabel kualitas laporan keuangan 0.647 berada pada kisaran 0 hingga 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent memiliki kekuatan prediksi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji *F-Square*

Effect size (f^2) digunakan untuk mengukur besar pengaruh variabel, tidak hanya signifikansinya. Nilai f^2 di atas 0,15 menunjukkan pengaruh moderat pada model struktural (Sihombing & Arsani, 2024).

Tabel 8 Hasil Uji *F-Square*

	GG	KLK	KS DM	SIP D	S PI
<i>Good Governance</i>		0.382			
Kualitas Laporan Keuangan					
Kualitas Sumber Daya Manusia		0.443			
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		0.111			
Sistem Pengendalian Internal		0.060			

Berdasarkan Tabel 8, *Good Governance* ($f^2 = 0,382$) dan Kualitas SDM ($f^2 = 0,443$) memiliki effect size moderat terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SIPD ($f^2 = 0,111$) dan SPI ($f^2 = 0,060$) memiliki effect size lemah karena berada di bawah 0,15.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel melalui nilai path coefficient (-1 hingga +1) serta signifikansi p-value. Hipotesis diterima jika p-value < 0,05.

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

	Ori gin al Sa mp	Sa mp le Me an	Stand ard Devia tion (STD	T Stati stic s (O/	P Val ue s	Kete rang an
--	---	---------------------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------

	le (O)	(M)	EV)	STD EV)		
X 1 - > Y	- 0.2 44	- 0.2 31	0.068	3.57 3	0.0 00	Diter ima
X 2 - > Y	0.1 98	0.1 95	0.096	2.06 9	0.0 39	Diter ima
X 3 - > Y	0.5 49	0.5 47	0.127	4.33 5	0.0 00	Diter ima
X 4 - > Y	0.4 28	0.4 23	0.110	3.90 3	0.0 00	Diter ima

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel SIPD berpengaruh signifikan dengan arah negatif ($\beta = -0,244$; $p < 0,05$), sedangkan SPI ($\beta = 0,198$; $p < 0,05$), Good Governance ($\beta = 0,549$; $p < 0,05$), dan kualitas SDM ($\beta = 0,428$; $p < 0,05$) berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknologi, pengendalian, tata kelola, dan kompetensi aparatur.

Secara umum, Good Governance dan kualitas SDM menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan, sedangkan SIPD menunjukkan arah pengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada sistem informasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan sumber daya manusia dalam organisasi.

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem informasi yang belum optimal justru berpotensi menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi belum tentu meningkatkan kualitas laporan apabila tidak didukung oleh kesiapan organisasi, kualitas data, serta kompetensi pengguna.

Berdasarkan perspektif *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah dituntut mampu mengelola sumber daya publik secara optimal (Davis et al., 1997). Namun, keterbatasan pemahaman sistem dan kendala teknis dapat menghambat efektivitas SIPD. Hasil ini sejalan dengan Napitupulu et al. (2024) dan Kahfi (2025) yang menyatakan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi tantangan teknis dan kesiapan SDM. Oleh karena itu, optimalisasi pelatihan, integrasi sistem, dan dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas SIPD. Lebih jauh pengaruh negative SIPD terhadap kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor: pertama, adanya resistensi terhadap perubahan (*resistence to change*) dari apartur yang terbiasa dengan sistem manual; kedua, ketidakstabilan jaringan dan gangguan teknis yang menyebabkan keterlambatan input data; ketiga, integrasi antar modul SIPD yang belum optimal sehingga menimbulkan redundansi dan inkonsistensi data; keempat, kurangnya kompetensi pengguna dalam memanfaatkan seluruh fitur SIPD secara efektif; kelima. Beban administrasi yang meningkat selama masa transisi implementasi sistem baru. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian (Napitupulu et al., 2024) dan (Kahfi, 2025) yang menyoroti bahwa keberhasilan SIPD sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan infrastruktur, bukan sekear ketersediaan sistem secara teknis.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian yang efektif mampu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan keandalan informasi keuangan.

Temuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta didukung oleh *Stewardship Theory* yang menekankan pentingnya pengelolaan yang bertanggung jawab (Davis et al., 1997). Penelitian sebelumnya oleh Hanif et al. (2023) dan Rahmawati et al. (2022) juga menunjukkan bahwa SPI berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penguatan kontrol internal seperti pemisahan tugas, audit internal, dan manajemen risiko menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas pelaporan.

Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Jensen & Meckling, 1976). Hasil ini sejalan dengan Ardiansyah et al. (2025) dan Hosana et al., n.d.(2021) yang menyatakan bahwa good governance meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, pengawasan publik, dan budaya akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengalaman, dan kemampuan teknis pegawai menjadi faktor utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan perspektif *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab profesional dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya publik (Davis et al., 1997; Jensen & Meckling, 1976). Hasil ini didukung oleh Mediaty et al. (2025) dan Rahmawati et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Good Governance, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan arah pengaruh yang berbeda. SIPD berpengaruh negatif, sedangkan SPI, Good Governance, dan SDM berpengaruh positif, di mana Good Governance dan SDM menjadi faktor dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh efektivitas pengendalian, tata kelola, dan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan implementasi SIPD serta memperkuat tata kelola dan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan

optimalisasi implementasi SIPD melalui penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan stabilitas sistem, serta pelatihan penggunaan sistem bagi aparatur agar penerapan SIPD dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, organisasi perangkat daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal melalui pengawasan yang lebih baik, evaluasi berkala, dan penerapan manajemen risiko guna meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan prinsip Good Governance juga perlu terus ditingkatkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan regulasi keuangan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan serta memperluas objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- 2008, P. N. 6. T. (2008). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH*.
- Ardiansyah, M. I., Khairiah, A., Sitepu, A. M., Simanjorang, M., & Supraja, G. (2025). ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 55–75.
- BPK. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022*. BPK RI.
- BPK RI. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024*. Badan
- Pemeriksa Keuangan.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory OF Management. *Academy of Management Review*, 22.
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. 19(4), 9–30.
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2016). *Information Systems Success Measurement*.
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2024). PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIMODERASI OLEH TEKNOLOGI INFORMASI. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(05), 1548–1561.
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109(August 2019), 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
- Hanif, R. A., Silalahi, S. P., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023). Disclosure level of local government ' s financial statements in Indonesia : Role of the internal control system. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(3). [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(3\).2023.02](https://doi.org/10.21511/imfi.20(3).2023.02)
- Hardani, P., Ustiawaty, J., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Hosana, A. T., Rispantyo, & Widarno, B. n.d.(2021) PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP

- KUALITAS LAPORAN KEUANGANKDENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Karanganyar). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 158–168.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3 . 0. *Universitas Brawijaya*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1023202519395>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kahfi, Z. N. Al. (2025). *Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di provinsi lampung*. 1–15.
- Karso, A. J. (2022). *GOOD GOVERNANCE*.
- Khairudin, Rahmawati, Winarna, J., & Gantjowati, E. (2022). *An Overview of Good Governance of Local Government During the Covid-19 Pandemic in Indonesia*. 2015. <https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316782>
- Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., Hs, R., Mas'ud, A. A., & Aziz, R. H. A. (2025). Human Competencies: Amplifying Financial Reporting Quality in Indonesian Local Government. *Riks and Financial Management*, 23, 1–21.
- Muttaqin, I., Adiranti, U., Dewi, R., & Rf, Z. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI*, 9(77), 2310–2318.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan : Pentingnya Kompetensi SDM. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Napitupulu, D. L., Bancin, M. R. H., Lubis, T. A., Juanda, R. A., & Sari, E. N. (2024). Implementation and Effectiveness Of Local Government Information System (SIPD) In Indonesia: A Literature Study. *Medan International Economics and Business*, 2(1), 1901–1919.
- Nations, U. (2022). *UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2022*.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: PERAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMEDIASI. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Ramadhani, N., & Yaya, R. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi Determinants of Local Government Financial Report Quality with Internal Control System as Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika Available*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6064>
- Salsabila, A. (2024). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kabupaten Bantul*.
- Sanjaya, A. (2017). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus
Pada SKPD Kab. Soppeng). *Skripsi*.

Sentosa, G. D., & Zuraidah. (2020).
RANCANGAN PENERAPAN SAK
EMKM DENGAN APLIKASI
AKUNTANSI UKM PADA BODY
GYM FITNESS CENTER MALANG.
EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi,
11(1), 17–35.

Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2024).
*Aplikasi SmartPLS Untuk Statistisi
Pemula*.

Sugiono, P. D. (2020). *METODE
PENELITIAN KUNTITATIF
KUALITATIF DAN R&D*.

WorldBank. (2023). *Strengthening Public
Financial Management Systems in
Developing Countries*. World Bank
Group.

Yenni, E., Junaedia, A. T., & Wijaya, E.
(2024). The Impact of Government
Accounting Standards
Implementation, Internal Control
Systems, and Human Resource
Competence on Regional Financial
Reporting Quality. *Journal of Applied
Business and Technology*, 5(3), 134–
145.

Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I.
(2022). Pengaruh Kompetensi
Pengguna, Teknologi Informasi Dan
Implementasi SIPD Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Langsa.
*Ekonomi Bisnis Manajemen Dan
Akuntansi (EBMA)*, 3, 794–804.